



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SUPENDI
2. Jabatan : KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN
3. NHK : 236849

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 3.695.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/150 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 1.481 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 575.000.000
3. Tanah Seluas 436 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/120 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 570.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 308.500.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA X SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO 150 CC Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX 150 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. LAINNYA, KREUZ SEPEDA LIPAT Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
5. MOBIL, HYUNDAI STARGAZER PRIME Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
6. MOTOR, HONDA ADV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.



31.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.327.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	200.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	211.543.641
F. HARTA LAINNYA	Rp.	310.000.000
Sub Total	Rp.	6.052.543.641
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	6.052.543.641

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.